

ABSTRAK

Hendy Apriyandi (01656180062)

KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERJANJIAN DUA BELAS PERUSAHAAN PRODUSEN UNGGAS DI INDONESIA

(vi + 110 halaman; 1 gambar; 1 tabel)

Permasalahan dalam sektor perunggasan khususnya ayam ras telah mengakibatkan hancurnya peternak rakyat atau peternak skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. Permasalahan berkaitan dengan praktik persaingan usaha dalam penyesuaian populasi *parent stock* dan bentuk penyelenggaraan usaha ayam ras berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan penelitian ini untuk (1) mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 02/KPPU-I/2016 terhadap perjanjian dua belas perusahaan produsen unggas ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha, (2) serta menilai bentuk pengaturan penyelenggaraan kegiatan usaha perunggasan di Indonesia ditinjau dari asas dan tujuan hukum persaingan usaha.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deduktif analitis. Hasil penelitian penulis adalah (1) Pertimbangan hukum KPPU dalam Putusan Nomor 02/KPPU-I/2016 terhadap perjanjian dua belas perusahaan produsen unggas tidak sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perjanjian dua belas perusahaan produsen unggas tidak memenuhi unsur kartel dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 dan harus dikecualikan dari Hukum Persaingan Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf (a) dan Pasal 51 UU No. 5/1999 dikarenakan adanya perintah melalui peraturan perundang-undangan dari Pemerintah. (2) Bentuk pengaturan penyelenggaraan kegiatan usaha perunggasan di Indonesia ditinjau dari asas dan tujuan Hukum Persaingan Usaha maka Pasal 2 UU No. 41/2014 bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Bentuk pengaturan penyelenggaraan kegiatan usaha yang mengacu pada UU No. 41/2014 tersebut menjadi salah satu penyebab hancurnya UMKM, sehingga Undang-Undang tersebut bukan merupakan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang baik dikarenakan konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkannya justru telah merugikan UMKM.

Referensi: 28 (1953-2014)

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Monopoli, Kartel.

ABSTRACT

Hendy Apriyandi (01656180062)

THE STUDY OF ANTITRUST LAW AGAINST THE AGREEMENT OF THE TWELVE POULTRY PRODUCERS IN INDONESIA

(vi + 110 halaman; 1 picture; 1 table)

A problem in the poultry sector, particularly local chicken farmers (micro scale breeders) has resulted in the destruction of local chicken farmers or Small and Medium Enterprises (SMEs) in running their business. The problem is related to business rivalry practices in the adaptation of the parent stock population and the execution of broiler chicken business based on Law no. 41 of 2014 on Livestock and Animal Health. The purpose of this research is to (1) review and analyze the legal considerations of the Commission of Business Competition (KPPU) in verdict No. 02/KPPU-I/2016 against the agreement of twelve poultry producers companies reviewed from the Business Competition Law, (2) assess the arrangement of the implementation of poultry sector in Indonesia based on principles and purposes of Antitrust Law. This research is qualitative research using normative juridical methods. The type of data used is library data. The data analysis used is analytical deductive.

The result of this research is (1) The legal consideration of KPPU in verdict No. 02/KPPU-I/2016 against the agreement of twelve poultry producers are not in accordance with Antitrust Law, especially on Law no. 5 of 1999. The agreement of twelve poultry producers do not fulfill the cartel element in Article 11 Law no. 5/1999 and shall be excluded from the Antitrust Law as referred to in Article 50 letter (a) and Article 51 of Law no. 5/1999 due to command from laws and regulations. (2) The arrangement of the implementation of poultry sector in Indonesia based on principles and purposes of Antitrust Law is contradicted with Article 2 and Article 3 Law No. 5/1999. The arrangement of business activities that refer to Law no. 41/2014 is one of the causes of the destruction of SMEs, so that Law No.41/2014 is not a good law or regulations because of its consequences causes SME suffer loss.

Reference: 28 (1953-2014)

Keywords: Antitrust, Monopoly, Cartel.